

Optimalisasi Tata Kelola Dana Kampung untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

(Optimizing Village Fund Management to Improve Local Community Welfare)

Petrus Yeimo¹, Christina Martha Lewerissa², Petrus Izaach Suripatty³

Universitas Satya Wiyata Mandala, Papua Tengah, Indonesia^{1,2,3}

yeimop7@gmail.com¹, lewerissac@gmail.com², suripattyp@gmail.com³



Riwayat Artikel

Diterima pada 20 Mei 2025

Revisi 1 pada 05 Juni 2025

Revisi 2 pada 14 Juni 2025

Revisi 3 pada 22 Juni 2025

Disetujui pada 28 Juni 2025

Abstract

Purpose: To examine the application of good governance principles in village fund management and their impact on community welfare in Kampung Aikai, Papua Tengah.

Methodology/approach: The research employed a descriptive quantitative approach, collecting data through questionnaires, structured interviews, and document analysis. A purposive sampling technique was used to select 52 respondents familiar with village fund planning and implementation.

Results/findings: The findings indicate that the implementation of good governance principles in Aikai Village is relatively strong: transparency (75%), accountability (70%), and participation (80%). The impact on community welfare reached 72%, especially through improved basic infrastructure. However, challenges remain in documentation and comprehensive community involvement during program evaluation stages.

Conclusions: The study concludes that village fund management in Kampung Aikai generally adheres to good governance standards, contributing positively to community welfare. Improvements are needed in accountability mechanisms and inclusive participation across all phases of program management.

Limitations: The study is limited to one village, with a relatively small sample size, which may not fully represent broader patterns in other regions of Papua or Indonesia.

Contribution: The study offers insights for improving village fund governance in remote regions through stronger capacity and participatory systems.

Keywords: *Central Papua, Community Welfare, Governance, Participation, Village Funds.*

How to Cite: Yeimo, P., Lewerissa, C. M., Suripatty, I. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Dana Kampung Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 5(1), 1-6.

1. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya melalui penyaluran dana desa, bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dana desa, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diarahkan untuk mendukung pembangunan berbasis masyarakat setempat melalui penerapan prinsip partisipatif, akuntabel, dan transparan. Kebijakan ini sangat penting di wilayah-wilayah seperti Papua, di mana masyarakat adat secara historis menghadapi ketertinggalan dalam aspek ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Pengelolaan dana desa secara optimal telah terbukti berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal. Sebagai contoh, di Kabupaten Bondowoso, pengelolaan dana desa menunjukkan kontribusi sebesar 29,1% terhadap pembangunan ekonomi desa (Amin, 2020). Dana desa juga memperluas lapangan kerja dan mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai wilayah (Ningsih & Zaidi, 2024). Bahkan, di daerah tertinggal seperti Papua, efek positifnya tampak lebih menonjol dibandingkan wilayah lain (Fazri et al., 2022). Namun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat efektivitas penggunaan dana desa. Kurangnya transparansi, rendahnya kapasitas manajemen aparatur desa, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, menjadi persoalan umum (Rustan, 2024). Strategi untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan pengawasan yang ketat, serta penguatan peran masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana (Supriadin & Wardan, 2024).

Kampung Aikai di Distrik Paniai Timur, Papua Tengah, merupakan salah satu contoh nyata di mana pengelolaan dana kampung memainkan peran penting dalam pembangunan lokal. Namun dalam praktiknya, kampung ini juga menghadapi tantangan seperti keterlibatan masyarakat yang rendah, transparansi yang belum optimal, dan kapasitas aparatur yang terbatas. Tantangan-tantangan tersebut mengakibatkan rendahnya efisiensi penggunaan dana dan lemahnya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi kunci dalam memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi adalah elemen penting dalam pengelolaan keuangan publik desa. Penerapan prinsip-prinsip ini di Kampung Aikai masih menghadapi berbagai hambatan, tetapi juga menyimpan peluang besar untuk perbaikan jika diiringi dengan komitmen dari aparatur kampung dan dukungan dari masyarakat lokal.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkandalam pengelolaan dana kampung di Kampung Aikai dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan memetakan tantangan dan potensi solusi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola kampung serta menjadi referensi kebijakan pembangunan di wilayah tertinggal lainnya di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Aikai, Distrik Paniai Timur, Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kampung Aikai dan aparatur kampung yang terlibat dalam pengelolaan dana kampung. Penentuan sampel dilakukan secara purposive terhadap individu yang memahami langsung proses perencanaan dan pelaksanaan program dana kampung. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik deskriptif, dengan memanfaatkan tabulasi data dan distribusi persentase dari jawaban responden.

Dalam konteks implementasi prinsip tata kelola yang baik, terdapat tiga indikator utama yang menjadi fokus kajian, yaitu:

- a) **Transparansi:** Transparansi merupakan komponen penting dalam pengelolaan dana kampung yang baik. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat terkait penggunaan dan alokasi dana. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi mendorong kepercayaan publik dan meminimalisasi potensi penyimpangan Megasyara and Imawan (2023); (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021; Suci Aprilia, 2024).
- b) **Akuntabilitas:** Akuntabilitas menuntut pengelolaan dana yang bertanggung jawab, dengan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada otoritas maupun masyarakat. Hal ini penting

dalam menjaga kredibilitas aparatur kampung serta efektivitas penggunaan dana Cahyana (2023); (Syahadatina, 2017; Yusmaniarti, Sholihah, Khair, & Marini, 2021).

- c) Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana kampung sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga. Partisipasi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan (Putri & Oktavia, 2023; Suci Aprilia, 2024).

Selain ketiga prinsip utama tersebut, penelitian ini juga memperhatikan berbagai tantangan yang kerap dihadapi dalam implementasi tata kelola yang baik, antara lain: peningkatan kapasitas aparatur kampung melalui pelatihan dan penguatan SDM Siregar, Ritonga, and Jamaludin (2024); Kepatuhan terhadap regulasi seperti Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Sejati & Faradena, 2022); Pencegahan penyelewengan melalui mekanisme transparansi dan pelibatan publik dalam setiap tahap pengelolaan dana (Megasyara & Imawan, 2023). Pendekatan pada penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi tata kelola dana kampung di Kampung Aikai, serta menawarkan rekomendasi praktis dalam kerangka penguatan pemerintahan kampung yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

Menganalisis implementasi prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Aikai, Distrik Paniai Timur menjadi tujuan dari penelitian ini. Fokus utama dalam penelitian mencakup tiga prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat kampung. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 52 responden yang terdiri dari warga dan aparat kampung.

4.1 Transparansi Pengelolaan Dana Kampung

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden (75%) menyatakan informasi mengenai dana kampung seperti besaran anggaran dan penggunaan dana sudah diumumkan secara terbuka melalui pertemuan kampung dan papan informasi. Namun, masih terdapat sekitar 15% responden yang merasa informasi tidak disampaikan secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi telah dijalankan, upaya peningkatan kualitas dan detail informasi masih diperlukan agar masyarakat lebih memahami proses pengelolaan dana kampung secara menyeluruh.

4.2 Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana

Dalam aspek akuntabilitas, sekitar 70% responden menyatakan bahwa aparatur kampung telah melaksanakan pelaporan dana kampung secara periodik, baik kepada warga maupun pemerintah distrik. Meskipun demikian, terdapat 20% responden yang menilai bahwa laporan tersebut belum disertai dengan dokumentasi pendukung yang memadai, seperti rincian penggunaan dana dan bukti kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah berjalan, namun perlu diperkuat melalui sistem dokumentasi dan audit internal yang lebih konsisten.

4.3 Partisipasi Masyarakat

Sebanyak 80% responden menyatakan mereka dilibatkan dalam musyawarah kampung untuk menentukan program prioritas penggunaan dana kampung. Keterlibatan ini juga mencakup proses pengawasan dan pelaporan kegiatan. Partisipasi masyarakat cenderung lebih tinggi di tahap awal perencanaan dibanding pelaksanaan dan evaluasi. Oleh karena itu, peningkatan peran serta masyarakat pada seluruh tahapan program menjadi penting untuk mewujudkan pengelolaan yang inklusif dan berkelanjutan.

4.4 Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil survei, 72% responden menyatakan bahwa penggunaan dana kampung telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan, terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, MCK, dan akses air bersih. Beberapa responden menyebutkan bahwa belum semua program menjangkau kebutuhan masyarakat miskin secara langsung. Hal ini menunjukkan pentingnya pemetaan kebutuhan yang lebih akurat dan berbasis data agar intervensi dana kampung menjadi lebih tepat sasaran.

4.5 Ringkasan hasil dan visual temuan

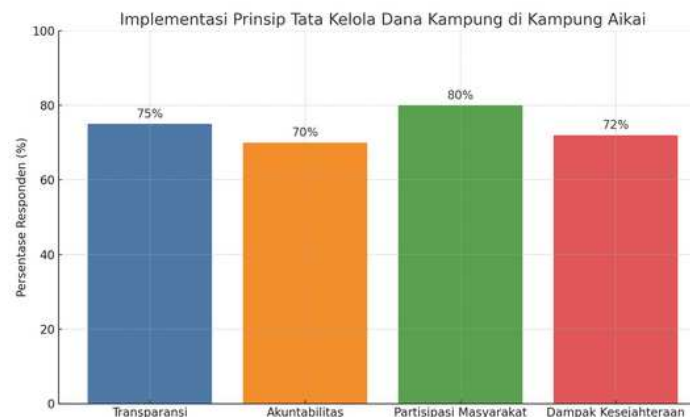
Gambaran menyeluruh terkait implementasi prinsip tata kelola dana kampung di Kampung Aikai, berikut ditampilkan ringkasan visual hasil kuesioner dari empat indikator utama:

Tabel 1. Ringkasan Implementasi Prinsip Tata Kelola dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Aikai

No	Indikator Tata Kelola	Persentase Responden (%)	Kategori Implementasi
1	Transparansi	75%	Baik
2	Akuntabilitas	70%	Cukup Baik
3	Partisipasi Masyarakat	80%	Sangat Baik
4	Dampak terhadap Kesejahteraan	72%	Baik

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner terhadap 52 responden masyarakat dan aparat Kampung Aikai, 2024.

Memperjelas pemahaman visual terhadap implemtasi prisip tata kelola berikut disajikan diagram batang hasil tabulasi :



Gambar 1. Persentase implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan dampak kesejahteraan berdasarkan hasil kuesioner responden Kampung Aikai.

4.6 Analisis Temuan dan Implikasi Kebijakan

Secara umum, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa prinsip tata kelola yang baik telah diimplementasikan dengan cukup baik di Kampung Aikai. Namun, masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam aspek dokumentasi akuntabilitas dan pelibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi. Penemuan ini mendukung temuan Megasyara and Imawan (2023) serta Suci Aprilia (2024), yang menyatakan bahwa praktik good governance yang efektif harus ditopang oleh kapasitas aparatur, kepatuhan regulasi, dan partisipasi aktif warga.

Implikasi kebijakan dari hasil ini antara lain:

- Perlu pelatihan bagi aparat kampung dalam bidang pelaporan keuangan dan transparansi informasi.
- Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Penguatan forum musyawarah kampung agar lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang semakin optimal, dana kampung dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan sosial di wilayah pedalaman seperti Kampung Aikai.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana kampung di Kampung Aikai telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Aspek transparansi, mayoritas masyarakat merasakan adanya keterbukaan informasi terkait penggunaan dana kampung. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah kampung dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan warganya.

Akuntabilitas, proses pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan secara berkala, namun masih terdapat kekurangan dalam hal dokumentasi dan pelampiran bukti yang lebih rinci. Partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan mayoritas warga merasa dilibatkan dalam proses musyawarah perencanaan. Indikator positif bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam pengambilan keputusan.

Dampak dari pengelolaan dana kampung juga dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam bentuk pembangunan fisik dan pelayanan dasar yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara keseluruhan, implementasi prinsip *good governance* di Kampung Aikai dapat dikategorikan baik, dan menjadi pondasi penting bagi penguatan tata kelola pembangunan berbasis komunitas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan beberapa hal berikut: Meningkatkan kapasitas aparatur kampung melalui pelatihan manajemen keuangan dan pelaporan untuk memperkuat aspek akuntabilitas; Mendorong transparansi yang lebih proaktif, seperti penyampaian informasi keuangan secara rutin melalui media kampung dan forum warga; Memperluas partisipasi masyarakat tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga pada tahap implementasi dan evaluasi program; Membangun sistem pengawasan partisipatif berbasis komunitas agar pengelolaan dana kampung tetap berada dalam koridor kepentingan publik; diharapkan pengelolaan dana kampung di Kampung Aikai dapat semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kampung Aikai, aparatur pemerintahan Distrik Paniai Timur, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai atas bantuan, dukungan, dan kerja samanya dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan informasi, akses data, serta fasilitasi selama proses pengumpulan data berlangsung.

Referensi

- Amin, S. (2020). Do the Village Fund Management Influence On The Economic Development Of The Village? *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(1), 12-24. doi:<https://doi.org/10.30998/jabe.v7i1.6997>
- Cahyana, P. G., & Suprasto, H. B. . (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2). doi:<https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p19>
- Fazri, M., Paluseri, A. R. A., Oktarina, A., Imron, D. K., Nababan, F. E., Pertiwi, C., . . . Aryani, Y. (2022). Does Village Fund Have an Impact Toward Economic Growth? *Economics Development Analysis Journal*, 11(4), 394-404. doi:<https://doi.org/10.15294/edaj.v11i4.60240>
- Megasyara, I., & Imawan, A. (2023). Implementasi good government sebagai upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 512-528. doi:<https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
- Ningsih, R. N., & Zaidi, N. A. B. (2024). Analysis of Village Fund Management in Improving the Community Economy in Indonesia. *Review on Islamic Accounting*, 4(1). doi:<https://doi.org/10.58968/ria.v4i1.539>
- Putri, R., & Oktavia, N. C. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran). *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 4(01), 77-93. doi:<https://doi.org/10.28918/jaais.v4i01.946>

- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good governance dalam pengelolaan dana desa teluk majelis kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24-33. doi:<https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Rustan, R. (2024). Effectivity of management of desa funding against development progress in Selayar District South Sulawesi Indonesia. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(1). doi:<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.11757>
- Sejati, D. A. P., & Faradena, W. R. (2022). *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Ujung-Ujung, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)*. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SENAMA).
- Siregar, M. S., Ritonga, S., & Jamaludin, Y. (2024). The Role of the Regional Inspectorate in Supervising Village Financial Management. *Journal La Sociale*, 6(2), 498-505. doi:<https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i2.1966>
- Suci Aprilia, E. S. (2024). Pengelolaan dana desa melalui prinsip good village governance di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2). doi:<https://doi.org/10.31539/budgeting.v5i2.9221>
- Supriadin, S., & Wardan, W. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan. *Economica Insight*, 1(1), 1-6. doi:<https://doi.org/10.71094/ecoin.v1i1.17>
- Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Rapa Laok kecamatan Omben kabupaten Sampang. *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2(1), 1-18. doi:<https://doi.org/10.35835/aktiva.v2i1.150>
- Yusmaniarti, Y., Sholihah, L. N., Khair, U., & Marini, M. (2021). Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations. *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 123-166. doi:<https://doi.org/10.37638/bima.2.2.123-166>